



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Raya Puspiptek No. 1, Setu, Kota Tangerang Selatan
Telp. (021) 7562233 Fax (021) 758 83251

Tangerang Selatan, 26 Agustus 2019

Nomor : 188.24/2289/PPH
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Raperda**

Kepada
Yth : Walikota Tangerang Selatan
di -
Ciputat

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Rapat Paripurna persetujuan bersama antara Walikota Tangerang Selatan dengan DPRD Kota Tangerang Selatan pada tanggal 22 Agustus 2019, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini Kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Demikian Kami sampaikan, untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diundangkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
KETUA,



H. MOCH RAMLIE MA, SE

Tembusan :

1. Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)**

KOTA TANGERANG SELATAN

Jln. Raya Puspiptek No. 1 Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
Telp. (021) 7562233 Fax. (021) 75883251

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 170/31/DPRD/2019**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah Menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka tertib hukum dan anggaran terhadap raperda yang masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 belum di bahas dan/atau belum selesai pembahasannya dimasukkan kembali ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2019).

Memperhatikan

- :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor: 188.24/2942/Huk, Tanggal 12 November 2019. Perihal Penyampaian Hasil Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020;
 - c. Kesepakatan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 170/05-Kesepakatan/DPRD/2019 dan 188/1536-HUK, tanggal 14 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA

: Judul rancangan peraturan daerah yang tertuang di dalam PROPEMPERDA sebagaimana diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 30 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,**



Tembusan:

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
2. Yth. Pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan;
3. Yth. Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan;
4. Arsin.

Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor : 170 /31/DPRD/2019

Tanggal : 30 November 2019

Perihal : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETEBERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Penanggulangan Kemiskinan	Prinsip tata cara penanggulangan kemiskinan, pendataan miskin di Kota Tangerang	√	-	1. Undang Undang Dasar 1945; 2. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	2019	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Hak dan Kewajiban, implementasi terhadap lanjut usia, koordinasi instansi daerah ke lanjut usia	√	-	1. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 2. PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan.	2019	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Tangerang Selatan;	Tim pembinaan, forum dan kelompok kerja, penghargaan.	√	-	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2019	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPALAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Rancangan Peraturan Daerah	Hari Jadi DPRD Kota Tangerang Selatan	Penetapan hari jadi DPRD Kota Tangerang Selatan	√	-	1. UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan; 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	2019		DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
5.	Rancangan Peraturan Daerah	Pesantren	tata cara pengelolaan pesantren	√	-	- UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	2020	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tangerang Selatan	terkait dengan Lalu Lintas dan angkutan jalan	-	√	1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	2019	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
7.	Rancangan Peraturan Daerah	Jaminan Makanan Halal	Jaminan Makanan Halal di Kota Tangerang Selatan	√	-	1. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;	2020	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
8.	Rancangan Peraturan Daerah	Pernyertaan Modal Kepada Bank Banten	Memberikan bantuan modal kepada Bank Banten	√	-	1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	2020	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Baru
9.	Rancangan Peraturan Daerah	Ketahanan Keluarga	membangun karakter keluarga di Kota Tangerang Selatan	√	-	1. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	2020	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Luncuran 2019

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Rancangan Peraturan Daerah	Pembangunan Budaya Integritas	Pemerintahan Daerah yang bersih	√	-	1. UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidanan Korupsi 2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Reguler.	2018	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Luncuran 2019
11.	Rancangan Peraturan Daerah	Perlindungan Produk Lokal	jenis produk lokal asli Kota Tangerang Selatan	√	-	- UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	2019	-	DPRD Kota Tangerang Selatan		Luncuran 2019
12.	Rancangan Peraturan Daerah	Badan Usaha Milik Daerah Khusus Air Minum	Pembentukan badan usaha milik daerah yang mengelola air minum	√	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	2020	-	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang		Baru
13.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tata cara penyusunan RKA Perangkat Daerah	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2020	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Baru

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah	√	-	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 	2020	-	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur		Baru
15.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung	Penyesuaian tim ahli bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung	√	-	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Pemilik Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 	2020	-	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang		Baru

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPALAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Rancangan Peraturan Daerah	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	√	-	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2020	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		Baru
17.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Prinsip Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, PPDB, dan sistem	√	-	1. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	2019	-			Luncuran 2019

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/ TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Rancangan Peraturan Daerah	Penambahan Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan	Bentuk dan nilai penyertaan modal	√	-	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah	2019	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Luncuran 2019
19.	Rancangan Peraturan Daerah	Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Terbuka	Bentuk dan nilai penyertaan modal	√	-	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	2019	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		Luncuran 2019
20.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Tata cara pengelolaan rumah susun sederhana sewa milik pemerintah daerah	√	-	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	2019	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Luncuran 2019
21	Rancangan Peraturan Daerah	Hymne Daerah	Penggunaan dan tata cara penggunaan dalam acara resmi Daerah	√	-	1. UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah	2019	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Luncuran 2019

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kota Tangerang Selatan	Jenis usaha, bentuk usaha, pembinaan, dan pengawasan	√	-	1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata 2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata	2019	-	Dinas Parawisata		Luncuran 2019
23.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenasah	Penyediaan TPU di luar Daerah, perhitungan TPU untuk rumah susun dan izin penggunaan petak makam	√	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2019	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Luncuran 2019
24.	Rancangan Peraturan Daerah	Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Fasilitasi penyuluhan, pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba	√	-	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	2019	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Luncuran 2019
25.	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2019	pelaksanaan anggaran 2019	√	-	1. Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Pasal 16 Ayat (4) dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah.	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Raperda Kumulatif Terbuka

NO	JENIS PRODUK HUKUM	JUDUL/TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DASAR HUKUM	DISERTAI		PEMRAKARSA DAN INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETE RANGAN
				BARU	UBAH		NA	Pen/Ket			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Ringkasan Perubahan APBD, Rincian Perubahan APBD, Rekapitulasi Perubahan Belanja, Daftar Jumlah Pegawai Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali serta daftar pinjaman daerah	√	-	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Raperda Kumulatif Terbuka
27.	Rancangan Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021	Ringkasan APBD, Rincian APBD, Rekapitulasi, Daftar Jumlah, Penyertaan Modal	√	-	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 31 Ayat UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Pasal 16 Ayat (4) dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Daerah. 	-	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Raperda Kumulatif Terbuka

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**



ABDUL RASYID